



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 1 /POJK.05/2017

TENTANG

PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PENJAMIN

CONTOH FORMAT 1 PERMOHONAN IZIN USAHA LEMBAGA PENJAMIN

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB

Direktur IKNB Syariah**)

Gedung Menara Merdeka

Jl. Budi Kemuliaan I No. 2

Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
../POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga
Penjamin, bersama ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)

Alamat :

Kota

Provinsi

No. tlp/fax :

Email :,

mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai
Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Penjaminan Ulang/ Perusahaan
Penjamin Syariah/ Perusahaan Penjamin Ulang Syariah*).

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami
sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yang paling sedikit harus memuat:
 - a. nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah operasional;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 - c. permodalan;
 - d. kepemilikan; dan
 - e. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota DPS;dan perubahan anggaran dasar (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
2. susunan organisasi yang menggambarkan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan yang ditetapkan oleh Direksi, dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
3. data pemegang saham atau anggota selain PSP:
 - a. dalam hal pemegang saham atau anggota adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah:
 - 1) 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;
 - 2) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - 3) daftar riwayat hidup;
 - 4) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - 5) fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak untuk 1 (satu) tahun terakhir;

- 6) surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa:
 - a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
 - b) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
 - c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - d) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;
 - e) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - f) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - g) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - h) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- b. dalam hal pemegang saham adalah badan hukum, dokumen yang dilampirkan adalah:
 - 1) fotokopi akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir yang telah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir;
 - 3) daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham yang disertai dengan dokumen pendukungnya yang menunjukkan persentase kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - 4) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
 - 5) data direksi badan hukum tersebut meliputi:
 - a) 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;
 - b) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - c) daftar riwayat hidup;
 - d) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
 - e) surat pernyataan Direksi atau yang setara dari badan hukum

dimaksud yang menyatakan bahwa:

- (1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
 - (2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
 - (3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - (4) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;
 - (5) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - (6) tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- c. dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri dengan fotokopi Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Lembaga Penjamin; dan
- d. dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah, dilampiri dengan fotokopi Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Lembaga Penjamin;
4. sistem dan prosedur kerja usaha Penjaminan/Penjaminan Syariah/ Penjaminan Ulang/Penjaminan Ulang Syariah*) berupa:
- a. prosedur operasi standar (*standard operating procedure*);
 - b. contoh perjanjian kerja sama; dan
 - c. contoh Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah yang akan digunakan oleh Lembaga Penjamin;
5. bukti mempekerjakan tenaga ahli penjaminan atau penjaminan syariah berupa:
- a. bukti pengangkatan tenaga ahli; dan
 - b. dokumen pendukung pemenuhan persyaratan tenaga ahli.
6. fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor dalam bentuk setoran tunai dari pemegang saham atau anggota dan fotokopi bukti penempatan modal disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka atas nama Lembaga Penjamin yang bersangkutan pada:
- a. salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia bagi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang; atau
 - b. salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran dan masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha.
7. rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat:

- a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
 - b. rencana kegiatan usaha Lembaga Penjaminan dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
 - c. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan serta asumsi yang mendasarinya yang dimulai sejak Lembaga Penjamin melakukan kegiatan operasional.
8. bukti kesiapan infrastruktur paling sedikit berupa:
- a. daftar aset tetap dan inventaris beserta bukti kepemilikan atau penguasaan;
 - b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; dan
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP).
9. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan
10. dokumen lain dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, meliputi;
- a. fotokopi akta RUPS yang menyatakan pengangkatan DPS, bagi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
 - b. laporan posisi keuangan awal/pembukaan perusahaan;
 - c. rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia untuk paling singkat 3 (tiga) tahun mendatang;
 - d. fotokopi pedoman tata kelola Perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin;
 - e. fotokopi perjanjian kerja sama antara pihak asing dan pihak Indonesia, bagi Lembaga Penjamin yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:
 - 1) komposisi permodalan, susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan; dan
 - 2) kewajiban pihak asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya; dan
 - f. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan izin usaha ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 2 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .. /POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/ Koperasi*)

Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :,

melaporkan bahwa kami telah memulai kegiatan usaha penjaminan/ penjaminan syariah/ penjaminan ulang/ penjaminan ulang syariah*) pada tanggal

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:

1. Fotokopi perjanjian kerjasama (jika ada);
2. Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah yang telah dilakukan; dan
3. fotokopi surat izin menetap dan atau surat izin menggunakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 3 IZIN UNIT USAHA SYARIAH

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, bersama ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/Perseroan Terbatas/ Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi
No. tlp/fax :
Email :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Syariah/ Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah*).

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. perubahan anggaran dasar yang mencantumkan :
 - a. salah satu maksud dan tujuan Perusahaan Penjaminan yaitu melakukan kegiatan usaha Penjaminan Syariah; dan
 - b. wewenang dan tanggung jawab DPS,
disertai dengan bukti persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
2. fotokopi bukti setoran modal kerja minimum dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Penjaminan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran dan masih berlaku selama dalam proses perizinan UUS;
3. surat keputusan Direksi Perusahaan Penjaminan yang menyetujui penempatan modal kerja pada UUS disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya;
4. risalah RUPS mengenai pengangkatan DPS;
5. data pimpinan UUS, meliputi :
 - a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm;
 - d. bukti pengangkatan sebagai pimpinan UUS;
 - e. bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan

syariah; dan

f. surat pernyataan yang menyatakan :

1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan

2) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain pada Perusahaan Penjaminan yang sama, kecuali pimpinan UUS adalah Direksi.

6. laporan keuangan awal UUS yang terpisah dari kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan;

7. susunan organisasi yang menggambarkan kedudukan UUS dan struktur UUS yang ditetapkan oleh Direksi, dilengkapi dengan jumlah dan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;

8. rencana kerja UUS yang akan dibuka untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat:

a. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;

b. target Penjaminan Syariah dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud;

c. sistem dan prosedur kerja; dan

d. proyeksi arus kas bulanan serta asumsi yang mendasarinya yang dimulai sejak UUS melakukan kegiatan operasional serta proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan izin usaha ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 4 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA UNIT USAHA SYARIAH

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami :

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

melaporkan bahwa kami telah memulai kegiatan usaha Unit Usaha Syariah pada tanggal

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:

1. fotokopi perjanjian kerja sama Penjaminan Syariah yang telah dilakukan (jika ada); dan
2. fotokopi Sertifikat Kafalah yang telah dilakukan.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 5 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG UNIT USAHA SYARIAH

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, bersama ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)

Alamat :

Kota

Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

Menyampaikan permohonan pembukaan Kantor Cabang UUS Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*).....pada tanggal

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. data pimpinan Kantor Cabang UUS, meliputi:
 - a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; dan
 - b. daftar riwayat hidup;
2. data sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan syariah, disertai bukti pengalaman dan/atau pelatihan yang telah diikuti;
3. data alamat lengkap Kantor Cabang UUS disertai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; dan
4. rencana kerja Kantor Cabang UUS yang akan dibuka yang paling sedikit memuat:
 - a. target Penjaminan Syariah dan langkah-langkah untuk mewujudkan target dimaksud disertai asumsi pendukungnya;
 - b. sistem dan prosedur kerja;
 - c. struktur organisasi; dan
 - d. jumlah dan susunan personalia.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 6 PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR CABANG UNIT USAHA SYARIAH

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, bersama ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)

Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

melaporkan bahwa kami telah melakukan penutupan Kantor Cabang UUS Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)..... pada tanggal

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. bukti pemberitahuan rencana penutupan Kantor Cabang UUS; dan
- b. bukti penyelesaian hak dan kewajiban Terjamin dan/atau Penerima Jaminan.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 7 PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN UNIT USAHA SYARIAH

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .. /POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/ Koperasi*)

Alamat :

Kota

Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

mengajukan permohonan untuk pencabutan izin UUS

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. asli salinan keputusan mengenai pemberian izin UUS;
2. alasan penutupan; dan
3. bukti pelaksanaan ketentuan.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 8 PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :
Email :

melaporkan bahwa kami telah melakukan pengangkatan tenaga ahli sebagai berikut:

No	Nama	Bidang Keahlian
1		
dst		

pada tanggal

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi sertifikat keahlian dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Penjaminan atau Penjaminan Syariah;
- b. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
- c. daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
- d. surat keterangan dari asosiasi Lembaga Penjamin bahwa tidak sedang dalam penganan sanksi.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 9 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN LINGKUP WILAYAH OPERASIONAL

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini dilaporkan bahwa kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)

Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

bersama ini kami mengajukan permohonan perubahan lingkup wilayah operasional:

Pasal	Isi Pasal (sebelum Perubahan)	Isi Pasal (Setelah Perubahan)

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. rencana perubahan anggaran dasar;
- b. bukti persetujuan perubahan lingkup wilayah operasional dari PSP; dan
- c. rencana kerja yang paling sedikit memuat:
 1. rencana kegiatan usaha Lembaga Penjamin dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
 2. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan yang dimulai sejak Lembaga Penjamin melakukan kegiatan operasional dengan lingkungan wilayah operasional yang baru.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 10 PELAPORAN PERUBAHAN NAMA LEMBAGA PENJAMIN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini dilaporkan bahwa kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi
No. tlp/fax :
Email :

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham/ rapat anggota*) tanggal..... telah melakukan perubahan nama perusahaan menjadi Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*) pada tanggal sebagai berikut:

Pasal	Isi Pasal (sebelum Perubahan)	Isi Pasal (Setelah Perubahan)

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen berupa fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama baru dari Lembaga Penjamin dan:

- a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
- b. fotokopi akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum koperasi; atau
- c. peraturan pemerintah yang mendasari perubahan nama bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 11 PELAPORAN PERUBAHAN MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)

Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham/ rapat anggota*) tanggal..... telah melakukan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pada tanggal sebagai berikut:

Pasal	Isi Pasal (sebelum Perubahan)	Isi Pasal (Setelah Perubahan)

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti pengesahan atau persetujuan dari instansi berwenang.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 12 PELAPORAN PERUBAHAN TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR PUSAT LEMBAGA PENJAMIN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .. /POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/ Koperasi*)

Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham/ rapat anggota*) tanggal..... telah melakukan perubahan tempat kedudukan kantor pusat pada tanggal sebagai berikut:

Pasal	Isi Pasal (sebelum Perubahan)	Isi Pasal (Setelah Perubahan)

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen berupa fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas alamat baru dari Lembaga Penjamin dan:

- a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
- b. fotokopi akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum koperasi; atau
- c. peraturan pemerintah yang mendasari perubahan tempat kedudukan bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum; dan
- d. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas alamat baru dari Perusahaan.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 13 PELAPORAN PENGURANGAN MODAL DISETOR BAGI LEMBAGA PENJAMIN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi
No. tlp/fax :
Email :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham/rapat anggota*) tanggal, telah dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas mengenai pengurangan modal, sebagai berikut:

Permodalan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1. Modal dasar		
2. Modal disetor		

dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham Sebelum Perubahan (Rp)	Total Nilai Saham Setelah Perubahan (Rp)
1.			
dst.			

Adapun alasan pengurangan modal tersebut adalah

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan perubahan anggaran dasar disertai dengan dokumen perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang, yang persetujuannya kami terima pada tanggal **).

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 14 PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR LEMBAGA PENJAMIN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi
No. tlp/fax :
Email :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham/rapat anggota*) tanggal, telah dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas mengenai penambahan modal disetor dan ditempatkan, sebagai berikut:

Permodalan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1. Modal dasar		
2. Modal yang ditempatkan		

dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut**):

No.	Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham Sebelum Perubahan (Rp)	Total Nilai Saham Setelah Perubahan (Rp)
1.			
dst.			

Adapun alasan penambahan modal tersebut adalah

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
- b. bukti penambahan Modal Disetor, yaitu:
 - 1) fotokopi bukti setoran pelunasan Modal Disetor dari pemegang saham dan fotokopi bukti penempatan Modal Disetor atas nama Lembaga Penjamin pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai;

- 2) laporan keuangan Lembaga Penjamin yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk konversi saldo laba, konversi pinjaman yang diterbitkan dalam bentuk obligasi wajib konversi, dan/atau dividen saham; dan
 - 3) laporan penilai independen atas nilai tanah dan bangunan, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk tanah dan bangunan
- c. surat pernyataan pemegang saham atau anggota koperasi yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan dalam hal penambahan modal dilakukan dalam bentuk uang tunai;
 - d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berupa badan usaha, lembaga atau badan hukum koperasi; dan
 - e. rencana bisnis (*business plan*) dan langkah-langkah Lembaga Penjamin dalam penggunaan penambahan Modal Disetor.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu
**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 15 PELAPORAN PERUBAHAN STATUS LEMBAGA PENJAMIN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBATAS TERBUKA ATAU SEBALIKNYA

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

melaporkan bahwa sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal, telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan mengenai status perusahaan perseroan terbatas tertutup/terbuka*), sebagai berikut:

Pasal	Isi Pasal (sebelum Perubahan)	Isi Pasal (Setelah Perubahan)

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang, yang persetujuannya kami terima pada tanggal

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 16 PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .. /POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/ Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi
No. tlp/fax :
Email :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham/rapat anggota*) tanggal telah dilakukan perubahan anggaran dasar Lembaga Penjamin mengenai anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah*) yaitu:

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Komisaris		
Direktur		
Anggota Dewan Pengawas Syariah		

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi akta risalah RUPS bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.
- b. fotokopi akta risalah rapat anggota bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum koperasi; dan
- c. bukti pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 17 PELAPORAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM LEMBAGA PENJAMIN BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi
No. tlp/fax :
Email :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham/rapat anggota*) tanggal telah dilakukan perubahan anggaran dasar Lembaga Penjamin mengenai pemegang saham yaitu:

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Pemegang Saham		

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- fotokopi akta pemindahan hak atas saham, dalam hal terjadi pemindahan hak atas saham;
- data pemegang saham selain PSP, dalam hal terdapat pemegang saham baru; dan
- surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli saham Lembaga Penjamin tidak berasal kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan, dalam hal terjadi jual beli saham.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 18 PELAPORAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM LEMBAGA PENJAMIN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)

Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

melaporkan bahwa sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal, telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan mengenai bentuk badan hukum, sebagai berikut:

Pasal	Isi Pasal (sebelum Perubahan)	Isi Pasal (Setelah Perubahan)

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- risalah RUPS atau peraturan pemerintah mengenai perubahan bentuk badan hukum Lembaga Penjamin;
- bukti perubahan bentuk badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; dan
- fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama bentuk badan hukum Lembaga Penjamin yang baru.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 19 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .. /POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/ Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi
No. tlp/fax :
Email :

melaporkan bahwa kantor pusat/ kantor cabang kami di telah kami pindahkan dengan data sebagai berikut:

Alamat lama :
Telepon :
Alamat baru :
Telepon :
Tanggal pemindahan :

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. data alamat lengkap kantor pusat dan/atau kantor cabang; dan
- b. bukti penguasaan gedung kantor.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

**CONTOH FORMAT 20 PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGGABUNGAN
ATAU PELEBURAN**

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
../POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga
Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi
No. tlp/fax :
Email :

bersama ini kami mengajukan permohonan Penggabungan/ Peleburan*)
antara Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
dengan Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen
sebagai berikut:

- a. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan;
- b. rancangan akta Penggabungan atau Peleburan;
- c. rencana daftar kepemilikan dari Lembaga Penjamin hasil Penggabungan atau Peleburan;
- d. data pemegang saham atau anggota selain PSP dari Lembaga Penjamin hasil Penggabungan atau Peleburan
- e. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Lembaga Penjamin yang melakukan Penggabungan atau Peleburan;
- f. laporan keuangan proforma dari Lembaga Penjamin hasil Penggabungan atau Peleburan;
- g. rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama dari Lembaga Penjamin hasil Penggabungan atau Peleburan;
- h. susunan organisasi dari Lembaga Penjamin dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan;
- i. rancangan akta pendirian dari Lembaga Penjamin hasil Peleburan;
dan
- j. dokumen sebagaimana Pasal 13 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf h, huruf i dan huruf j dari Lembaga Penjamin hasil Peleburan.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan ini,
dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

***) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 21 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PENGGABUNGAN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

melaporkan bahwa kami telah melakukan Penggabungan antara Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*) dengan Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*) pada tanggal

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan;
- b. fotokopi akta Penggabungan; dan
- c. dokumen yang menyatakan bahwa Lembaga Penjamin yang menggabungkan diri tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 22 PERMOHONAN IZIN UNIT USAHA SYARIAH DAN/ATAU IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH LEMBAGA PENJAMIN YANG MENGGABUNGGKAN DIRI

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank

u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB

Direktur IKNB Syariah**)

Gedung Menara Merdeka

Jl. Budi Kemuliaan I No. 2

Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)

Alamat :

Kota

Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

mengajukan permohonan izin UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang*) Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*) yang sebelumnya dimiliki oleh Lembaga Penjamin yang menggabungkan diri.

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. izin UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang terdahulu yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin yang menggabungkan diri; dan
- b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung Kantor Cabang.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi

Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

***) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 23 PELAPORAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)

Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

melaporkan bahwa kami telah melakukan Penggabungan antara Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)..... dengan Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)..... pada tanggal

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 24 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PELEBURAN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .. /POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

melaporkan bahwa kami telah melakukan Peleburan antara Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)..... dengan Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)..... pada tanggal

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Peleburan;
- b. fotokopi akta Peleburan;
- c. fotokopi akta risalah RUPS mengenai pendirian perusahaan hasil Peleburan; dan
- d. dokumen yang menyatakan bahwa Lembaga Penjamin yang melakukan Peleburan tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang..

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 25 PERMOHONAN IZIN UUS DAN/ATAU IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG (JIKA ADA) YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH LEMBAGA PENJAMIN YANG MELEBURKAN DIRI

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

mengajukan permohonan izin UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang*) Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*) yang sebelumnya dimiliki oleh Lembaga Penjamin yang menggabungkan diri.

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. izin UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang terdahulu yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin yang meleburkan diri; dan
- b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung Kantor Cabang.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 26 PELAPORAN PELAKSANAAN PELEBURAN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**))
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .. /POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :
Email :

melaporkan bahwa kami telah melakukan Peleburan antara Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)..... dengan Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)..... pada tanggal

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 27 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PENGAMBILALIHAN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi
No. tlp/fax :
Email :

bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan rencana Pengambilalihan Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)..... oleh Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*) pada tanggal

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui Pengambilalihan;
- b. rancangan akta Pengambilalihan;
- c. rancangan akta pemindahan hak atas saham, dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham;
- d. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli saham Lembaga Penjamin tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan; dan
- e. data pemegang saham atau anggota selain PSP setelah Pengambilalihan; dan
- f. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Lembaga Penjamin.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 28 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PENGAMBILALIHAN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

melaporkan bahwa kami telah melakukan Pengambilalihan Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)..... oleh Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)..... pada tanggal

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Pengambilalihan;
- b. fotokopi akta Pengambilalihan; dan
- c. bukti pemberitahuan kepada instansi yang berwenang.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 29 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PEMISAHAN MURNI

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

mengajukan permohonan persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan murni Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi *) menjadi.....

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. rancangan akta Pemisahan;
- b. rancangan akta pendirian Lembaga Penjamin baru dan/atau badan hukum baru yang akan menerima aset, liabilitas, dan ekuitas;
- c. rancangan penyelesaian hak dan kewajiban Terjamin dan Penerima Jaminan bagi Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan murni;
- d. rencana daftar kepemilikan dari Lembaga Penjamin baru dan/atau badan hukum baru yang akan menerima aset, liabilitas, dan ekuitas;
- e. data pemegang saham atau anggota selain PSP dari Lembaga Penjamin baru hasil Pemisahan murni;
- f. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan murni;
- g. laporan keuangan proforma dari Lembaga Penjamin hasil Pemisahan murni;
- h. rencana kerja yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah mendapatkan izin usaha dari badan hukum baru yang merupakan Lembaga Penjamin, yang paling sedikit memuat:
 - 1) studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
 - 2) rencana kegiatan usaha Penjaminan atau Penjaminan Syariah dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
 - 3) proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan arus kas bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak Lembaga

Penjamin melakukan kegiatan operasional; dan

- i. susunan organisasi dari Lembaga Penjamin baru hasil Pemisahan murni.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 30 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PEMISAHAN MURNI

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank

u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB

Direktur IKNB Syariah**)

Gedung Menara Merdeka

Jl. Budi Kemuliaan I No. 2

Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)

Alamat :

Kota

Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

melaporkan bahwa kami telah melakukan Pemisahan murni Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)..... menjadi Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*) pada tanggal...

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Pemisahan murni; dan
- b. fotokopi akta Pemisahan murni.
- c. dokumen yang menyatakan bahwa Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan murni tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang.
- d. fotokopi akta risalah RUPS yang menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
- e. fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai dari pemegang saham atau anggota fotokopi bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama Lembaga Penjamin yang bersangkutan, dalam hal terdapat pemegang saham baru atau anggota baru (jika ada).
- f. laporan posisi keuangan awal/pembukaan dari badan hukum baru hasil Pemisahan murni; dan
- g. bukti kesiapan operasional dari badan hukum baru hasil pemisahan murni yang merupakan Lembaga Penjamin paling sedikit berupa:
 1. daftar aset tetap dan inventaris beserta bukti kepemilikan atau penguasaan;
 2. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; dan
 3. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

***) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 31 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH LEMBAGA PENJAMIN YANG MELAKUKAN PEMISAHAN MURNI

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank

u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB

Direktur IKNB Syariah**)

Gedung Menara Merdeka

Jl. Budi Kemuliaan I No. 2

Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)

Alamat :

Kota

Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

mengajukan Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan murni, yang beralamat di.....

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. izin pembukaan Kantor Cabang terdahulu yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan murni; dan
- b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung Kantor Cabang.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi

Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

***) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 32 PELAPORAN PELAKSANAAN PEMISAHAN MURNI

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .. /POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

melaporkan bahwa kami telah melakukan Pemisahan murni antara Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)..... dengan Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)..... pada tanggal

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 33 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PEMISAHAN TIDAK MURNI

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ../POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

mengajukan permohonan persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)..... menjadi.....

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. bagi Pemisahan tidak murni dengan cara mendirikan Lembaga Penjamin baru, meliputi*):
 - a. rancangan akta Pemisahan;
 - b. rancangan akta pendirian Lembaga Penjamin baru;
 - c. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Terjamin, Penerima Jaminan, dan pihak terkait lainnya;
 - d. rencana daftar kepemilikan dari Lembaga Penjamin baru;
 - e. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan tidak murni;
 - f. laporan keuangan proforma dari Lembaga Penjamin baru;
 - g. rencana kerja yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah mendapatkan izin usaha Lembaga Penjamin baru, yang paling sedikit memuat:
 - 1) studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
 - 2) rencana kegiatan usaha Penjaminan atau Penjaminan Syariah dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
 - 3) proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan arus kas bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak Lembaga Penjamin baru melakukan kegiatan operasional;
 - h. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulanan selama 3 (tiga) tahun dari Lembaga Penjamin yang akan

- melakukan Pemisahan terhitung sejak Pemisahan selesai dilakukan; dan
- i. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dan huruf c, POJK Nomor... ../POJK.05/... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin bagi Lembaga Penjamin baru hasil Pemisahan tidak murni;
2. bagi Pemisahan tidak murni dengan cara mendirikan badan hukum baru yang bukan merupakan Lembaga Penjamin, meliputi*):
 - a. rancangan akta Pemisahan;
 - b. rancangan akta pendirian badan hukum baru;
 - c. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan tidak murni; dan
 - d. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulanan selama 3 (tiga) tahun dari Lembaga Penjamin yang akan melakukan Pemisahan terhitung sejak Pemisahan selesai dilakukan;
 3. bagi Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan tidak murni dengan cara mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Lembaga Penjamin kepada Lembaga Penjamin lain, meliputi*):
 - a. rancangan akta Pemisahan;
 - b. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan tidak murni;
 - c. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Terjamin, Penerima Jaminan, dan pihak terkait lainnya;
 - d. rencana daftar kepemilikan dari Lembaga Penjamin lain;
 - e. dokumen Lembaga Penjamin yang akan menerima pengalihan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan tidak murni, meliputi:
 - 1) fotokopi izin usaha sebagai Lembaga Penjamin;
 - 2) laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik; dan
 - 3) laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulan terakhir sebelum menerima pengalihan aset, liabilitas, dan ekuitas;
 - f. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulanan selama 3 (tiga) tahun dari Lembaga Penjamin yang akan melakukan Pemisahan terhitung sejak Pemisahan selesai dilakukan; dan
 4. bagi Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan tidak murni dengan cara mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Lembaga Penjamin kepada badan hukum lain yang bukan merupakan Lembaga Penjamin, meliputi*):
 - a. rancangan akta Pemisahan;
 - b. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan tidak murni; dan

c. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulanan selama 3 (tiga) tahun dari Lembaga Penjamin yang akan melakukan Pemisahan terhitung sejak Pemisahan selesai dilakukan.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

***) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 34 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PEMISAHAN TIDAK MURNI

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**))
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .. /POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

melaporkan bahwa kami telah melakukan RUPS yang menyetujui Pemisahan Tidak Murni Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)..... menjadi Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi *) pada tanggal

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Pemisahan tidak murni;
- b. fotokopi akta Pemisahan tidak murni;
- c. fotokopi akta risalah RUPS yang menyatakan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai dari pemegang saham atau anggota fotokopi bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama Lembaga Penjamin yang bersangkutan, dalam hal terdapat pemegang saham baru (jika ada);
- e. laporan keuangan pembukaan dari badan hukum baru hasil Pemisahan tidak murni; dan
- f. bukti kesiapan operasional dari badan hukum baru hasil pemisahan tidak murni yang merupakan Lembaga Penjamin paling sedikit berupa:
 1. daftar aset tetap dan inventaris beserta bukti kepemilikan atau penguasaan;
 2. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; dan
 3. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

***) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 35 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG DAN/ATAU KANTOR CABANG UNIT USAHA SYARIAH (JIKA ADA) YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH LEMBAGA PENJAMIN YANG MELAKUKAN PEMISAHAN TIDAK MURNI

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)

Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

mengajukan Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang UUS (jika ada) yang sebelumnya dimiliki oleh Lembaga Penjamin yang melakukan pemisahan tidak murni, yang beralamat di.....

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. izin pembukaan Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang UUS (jika ada) terdahulu yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin yang melakukan Pemisahan tidak murni; dan
- b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang UUS (jika ada).

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 36 PELAPORAN PELAKSANAAN PEMISAHAN TIDAK MURNI

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

melaporkan bahwa kami telah melakukan Pemisahan tidak murni antara Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)..... dengan Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)..... pada tanggal

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 37 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

mengajukan Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang, yang beralamat di.....

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. bukti penguasaan gedung kantor;
- b. struktur organisasi dan nama calon kepala Kantor Cabang serta jumlah karyawan; dan
- c. rencana bisnis yang memuat rencana pembukaan Kantor Cabang Lembaga Penjamin.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 38 PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR CABANG

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .. /POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/ Koperasi*)

Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

melaporkan penutupan Kantor Cabang, yang beralamat di.....

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. bukti pemberitahuan rencana penutupan Kantor Cabang;
- b. bukti pemberitahuan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban; dan
- c. bukti penyelesaian hak dan kewajiban debitur.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 39 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN KONVERSI PERUSAHAAN PENJAMINAN ATAU PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG MENJADI PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH ATAU PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ../POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)

Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

mengajukan Permohonan Persetujuan konversi Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Penjaminan Ulang*) Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*).....menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah/ Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah*) Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)..... pada tanggal.....

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
2. rancangan perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:
 - a. nama, salah satu maksud dan tujuan perusahaan yaitu melakukan kegiatan usaha Penjaminan Syariah atau Penjaminan Ulang Syariah; dan
 - b. wewenang dan tanggung jawab DPS;
3. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit;
4. daftar Kantor Cabang yang dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang;
5. susunan organisasi yang dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
6. rencana kerja terkait kegiatan Penjaminan Syariah atau Penjaminan Ulang Syariah yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, yang paling sedikit memuat:
 - a. prosedur operasi standar (*standard operating procedure*);

- b. contoh perjanjian kerja sama; dan
 - c. contoh Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah yang akan digunakan oleh Lembaga Penjamin;
7. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Terjamin, Penerima Jaminan, dan pihak terkait lainnya;
 8. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
 9. rencana kegiatan usaha Penjaminan Syariah atau Penjaminan Ulang Syariah dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud;
 10. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan arus kas bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah melakukan kegiatan operasional; dan
 11. bukti mempekerjakan tenaga ahli di bidang penjaminan syariah.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 40 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI KONVERSI

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ../POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

melaporkan bahwa kami telah melakukan Konversi Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Penjaminan*) Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)..... menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah/ Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah*) Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi *) pada tanggal

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
2. fotokopi akta risalah RUPS yang menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
3. fotokopi perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:
 - a.nama, salah satu maksud dan tujuan perusahaan yaitu melakukan kegiatan usaha Penjaminan Syariah atau Penjaminan Ulang Syariah; dan
 - b. wewenang dan tanggung jawab DPS; dan
4. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil konversi.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 41 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PENJAMINAN ATAU PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG YANG DI KONVERSI

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)

Alamat :

Kota

Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

mengajukan Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang di konversi, yang beralamat di.....

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. izin pembukaan Kantor Cabang terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang dikonversi; dan
- b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung Kantor Cabang.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 42 PELAPORAN PELAKSANAAN KONVERSI

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ../POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

melaporkan bahwa kami telah melakukan Konversi Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Penjaminan*) Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)..... menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah/ Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah*) Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi *) pada tanggal

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 43 PELAPORAN PEMBUBARAN LEMBAGA PENJAMIN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**))
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .. /POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/ Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

dengan ini kami melaporkan pembubaran lembaga penjamin Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/ Koperasi*)..... karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/ jangka waktu berdirinya Lembaga Penjamin yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir/ putusan pengadilan atau keputusan pemerintah *).....

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. dokumen yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan atau penetapan pembubaran; dan
- b. asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Lembaga Penjamin.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 44 PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)

Alamat :

Kota

Provinsi

No. tlp/fax :

Email :

dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha sebagai Lembaga Penjamin Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)..... Sebagai bahan pertimbangan dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. alasan penghentian kegiatan usaha;
- b. uraian mengenai kondisi Lembaga Penjamin, termasuk data mengenai jumlah Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah yang masih berlaku, jumlah Terjamin dan/atau Penerima Jaminan, dan jumlah kewajiban Lembaga Penjamin kepada Terjamin dan/atau Penerima Jaminan;
- c. rencana penyelesaian kewajiban Lembaga Penjamin kepada seluruh kreditor; dan
- d. rencana pembubaran atau rencana lainnya setelah Lembaga Penjamin menyelesaikan kewajiban kepada seluruh kreditor dan izin usaha Lembaga Penjamin telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Lembaga Penjamin;
- b. keputusan RUPS mengenai persetujuan atas rencana penghentian kegiatan usaha Lembaga Penjamin;
- c. laporan keuangan terakhir Lembaga Pejamin;
- d. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara; dan
- e. bukti penyelesaian pungutan Otoritas Jasa Keuangan dan denda administratif terutang.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

CONTOH FORMAT 45 PELAPORAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ../POJK.05/.... tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dengan ini kami:

Nama : Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi
No. tlp/fax :
Email :

dengan ini kami melaporkan penghentian kegiatan usaha Lembaga Penjamin Perusahaan Umum/ Perseroan Terbatas/Koperasi*).....

Sebagai bahan pertimbangan dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Lembaga Penjamin;
- b. pelaksanaan pengumuman;
- c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban Lembaga Penjamin;
- d. neraca akhir Lembaga Penjamin yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
- e. surat pernyataan dari pemegang saham yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Lembaga Penjamin telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Perum/PT/Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

MULIAMAN D. HADAD

ttd

Yuliana